

FROM LOCAL WISDOM TO GLOBAL HARMONY: INTEGRATING ISLAMIC ECONOMIC VALUES WITH INDIGENOUS TRADITIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ahmad Faizal

Universitas Islam Cordoba Banyuwangi

faizal@uicordoba.ac.id

Cici Wijayanti

Universitas Islam Cordoba Banyuwangi

cici@uicordoba.ac.id

Dawimatus Sholihah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso

dawimatussholihah489@staiuicordoba.ac.id

Kurniawan Ramadhani

STAI Salafiyah Bangil

dhanisantoso333@gmail.com

Abstract: *Indonesia, as the country with the world's largest muslim population and rich local wisdom, faces serious challenges in achieving sustainable economic development. Inequalities in wealth distribution, the exploitation of natural resources, and the dominance of a capitalist economic system often neglect the values of justice and sustainability. On the other hand, local traditions such as "sasi" in Maluku, "subak" in Bali, and "gotong royong" in various regions reflect economic ethics that align with principles, including distributive justice (al-'adl), sustainability (istidam), and the entrusted stewardship of the earth (khalifah fil ardh). This article aims to analyze the potensial integration of islamic economic values with Indonesia's local wisdom as a model of sustainable development oriented toward global harmony. Using a qualitative approach based on literature review and contextual analysis, this study finds that the synergy between Islamic economics and local wisdom can provide alternative solutions to issues of socio-economic inequality, environmental degradation, and identity crises in the era of globalization. the findings of this study imply the strengthening of a value-based economic paradigm that is not only relevant at the local level but also capable of contributing to a more just, ethical, and harmonious global economic order.*

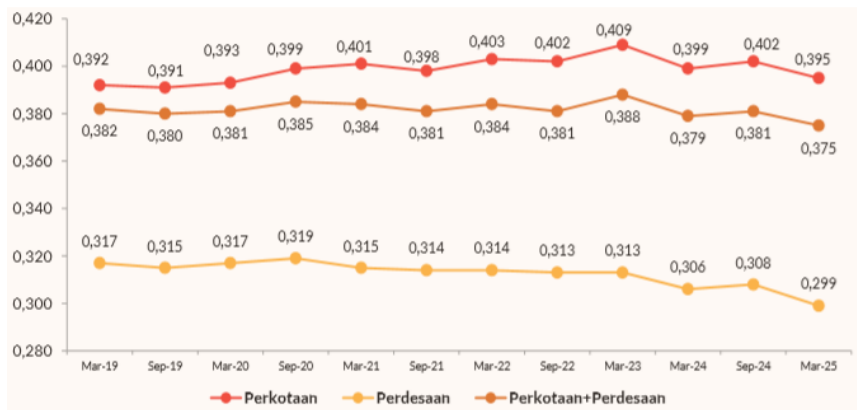
Keywords: *Islamic Economics, Local Wisdom, Sustainable Development, Economic Justice, Global Harmony*



PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya dan tradisi lokal dari pola gotong royong, sistem sosial adat, hingga pengelolaan lingkungan yang diwariskan turun-temurun. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dengan kearifan lokal.¹ Namun dalam praktik pembangunan, terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, serta degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan. Seiring upaya pemerintah dalam mendorong target pembangunan nasional termasuk visi Indonesia 2045 intergrasi system nilai ini merupakan tantangan, sehingga muncul kebutuhan mendesak untuk meneliti bagaimana nilai ekonomi islam dan kearifan local dapat diintegrasikan secara efektif untuk mendorong Pembangunan yang inklusif dan harmonis.²

Salah satu masalah utama di Indonesia adalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, yang meskipun menunjukkan sedikit penurunan, masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Misalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Rasio Gini Indonesia per Maret 2025 adalah 0,375,



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Gambar 1. Perkembangan Gini Ratio Maret 2019 – Maret 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Rasio Gini Indonesia per Maret 2025 adalah 0,375, sedikit turun dari sebelumnya namun masih menunjukkan ketimpangan moderat hingga tinggi dan ketimpangan di perkotaan tetap lebih buruk dibanding di perdesaan.³ Selain itu, persentase penduduk miskin per Maret 2024 adalah 9,03 % dari total populasi, sekitar 25,22 juta jiwa, menandakan adanya segmen besar masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan ekonomi secara proporsional.⁴

¹ Pew Research Center. (2020). *Muslim Population by Country*.

² Yanuarti, W. A., & Rachmawati, L. (2024). *Analyzing Sustainable Development in Indonesia Based on Environmental Kuznets Curve*

³ Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Tingkat Ketimpangan Ekonomi Turun: Rasio Gini Indonesia Jadi 0,375 per Maret 2025*. Ekonomi Bisnis.

⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab). (2024). *Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun*



Permasalahan ini diperparah dengan degradasi lingkungan, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang tidak merata, serta lemahnya inklusi keuangan di wilayah-wilayah terpencil. Di sisi lain, beberapa komunitas lokal masih mempraktikkan sistem ekonomi adat yang mengandung nilai keadilan, keberlanjutan, dan kerjasama, yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, bagi hasil, dan amanah. Namun keterkaitan sistem-formal dan informal ini belum dioptimalkan, sehingga muncul gap antara potensi nilai lokal dan penerapan kebijakan ekonomi nasional yang bersifat modern dan global.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek mengenai hubungan antara ekonomi Islam dan kearifan lokal di Indonesia. Contohnya, studi oleh Erwan et al. (2023) mengenai *Local Wisdom and Islamic Economics: Warung Madura MSME Success Strategy* menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menerapkan nilai Islam seperti keadilan dan etika bisnis, ditambah akses pembiayaan sesuai prinsip syariah, mampu meningkatkan daya saing usaha lokal.⁵ Studi lain oleh Ayif (2023) tentang *The Development Studies on Islamic Economic Education Based on Local Wisdom in Indonesia* mendalami bagaimana pendidikan ekonomi Islam yang disesuaikan dengan nilai multikultural lokal dapat memperkuat pemahaman dan praktik ekonomi yang etis di masyarakat.⁶ Ada pula penelitian oleh Ega (2022) tentang *Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal* yang mengeksplorasi akad pertanian seperti muzara'ah dan mukhabarah serta tantangan pembiayaan syariah di sektor pertanian.⁷ Keterbatasan dari studi-studi tersebut antara lain: fokus yang masih terbatas pada satu sektor atau komunitas, kurangnya data kuantitatif longitudinal yang menunjukkan dampak jangka panjang integrasi nilai lokal Islam terhadap pembangunan kesejahteraan dan lingkungan, serta kurangnya kajian yang menjembatani implementasi kebijakan formal dan praktek lokal secara sistematis.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat urgen. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan sebuah model integratif yang menjembatani nilai ekonomi Islam dan tradisi kearifan lokal di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Kontribusi yang diharapkan meliputi: pertama, memperjelas mekanisme bagaimana nilai lokal bisa diartikulasikan ke dalam praktik ekonomi Islam yang formal, termasuk kebijakan publik dan lembaga keuangan syariah; kedua, menghasilkan bukti empiris mengenai sejauh mana integrasi tersebut dapat mereduksi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan; ketiga, menyediakan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan agar

⁵ Erwan Aristyanto, Aditya Surya Nanda (2023). *Local Wisdom and Islamic Economics: Warung Madura MSME Success Strategy*. Prosiding ICEAT.

⁶ Ayif Fathurrahman (2023). *The Development Studies on Islamic Economic Education Based on Local Wisdom in Indonesia*. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 19(2), 233–251.

⁷ Ega Rusanti I, A. Syathir Sofyan 2, Syarifuddin (2022). *Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal*. Journal of Islamic and Indonesian Culture, 4(1), 45–57.



pengembangan ekonomi Indonesia dapat lebih harmonis, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan inspirasi bagi negara lain dengan konteks serupa dalam menggabungkan kearifan lokal dan prinsip Islam menuju harmoni global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur (library research) dengan analisis konseptual. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat filosofis normatif dan kultural, yakni integrasi antara nilai-nilai ekonomi Islam seperti *al-‘adl*, *istidam*, dan *khalifah fil ardh* dengan kearifan lokal seperti sasi, subak dan gotong royong yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Studi literatur dilakukan terhadap sumber-sumber utama ekonomi Islam, dokumen antropologis, serta laporan global mengenai pembangunan berkelanjutan untuk membangun dasar konseptual yang kuat.⁸

Untuk menjamin validitas analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi wacana dan sumber, yang diperoleh dari beberapa jurnal nasional maupun internasional. Relevansi tematik yang dikaji adalah integrasi ekonomi Islam, kearifan lokal, dan pembangunan berkelanjutan, serta kontekstualitas dengan realitas sosial-ekonomi Indonesia dan dinamika global. Temuan dari literatur Islam, kearifan lokal dan teori pembangunan global dari sumber tersebut untuk menghindari bias interpretasi. Hasil dari analisis pendekatan integratif dengan menghubungkan prinsip ekonomi Islam dan kearifan lokal Indonesia sebagai model alternatif pembangunan berkelanjutan adalah tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga harmoni nilai, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam perspektif global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Krisis Pembangunan dan Keterputusan Nilai dalam Sistem Ekonomi Modern

lingkungan dalam, sejak era reformasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro yang stabil namun kesenjangan distribusi pendapatan tetap menjadi masalah struktural. Data resmi BPS menunjukkan bahwa nilai Gini (Rasio ketimpangan pengeluaran) berkisar pada 0,38 – 0,39 pada tahun 2022-2023. Yang menandakan ketimpangan yang tidak bisa diabaikan meskipun angka kemiskinan ekstrem menurun. Ini mencerminkan realitas dimana pertumbuhan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis diterjemahkan menjadi pemerataan kesejahteraan.⁹

Kecenderungan eksploitasi sumber daya alam oleh aktor korporasi besar didorong oleh insentif pasar global dan relasi kekuasaan lokal menghidupkan fenomena yang sering disebut *resource curse* dan praktek “crony capitalism”. Bukti empiris dari studi-studi ekonomi dan kajian politik menunjukkan dampak ganda yaitu pertumbuhan ekonomi

⁸ UNDP. (2023). *Human Development Report & SDGs Review*. United Nations Development Programme.

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Tingkat Ketimpangan Ekonomi Turun: Rasio Gini Indonesia Jadi 0,375 per Maret 2025*.



berbasis ekstraksi yang menguntungkan segelintir aktor dan konsekuensi sosial lingkungan bagi komunitas lokal. Studi kuantitatif dan kasus misalnya studi tentang konflik lahan sawit: analisis efek kesehatan pada distrik tergantung ekstraktif mendokumentasikan peningkatan konflik sosial, penurunan kualitas lingkungan, dan beban kesehatan pada populasi lokal fenomena yang menegaskan adanya ketidakseimbangan manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya.¹⁰

Dari perspektif normatif dan kajian ekonomi Islam, keberpihakan terhadap akumulasi modal tanpa corong keadilan distributif mendapat kritik tajam. Literatur ekonomi Islam menekankan bahwa pembangunan yang hanya mengutamakan akumulasi keuntungan tanpa memperhatikan *maqasid* akan mengabaikan keadilan, amanah pengelola bumi dan keberlanjutan. Dalam praktik kombinasi kapitalisme finansial dan interaksi politik ekonomi lokal menghasilkan apa yang bisa disebut alienasi nilai yakni ketidak selarasan antara nilai-nilai sosial religius dan praktek ekonomi sehari-hari. Kondisi ini memicu krisis identitas ekonomi bagi masyarakat muslim, ketika sekularisasi praktik ekonomi dan logika pasar modal menjadi norma, ikatan nilai keagamaan dan tradisi lokal yang menuntun praktik ekonomi berkeadilan melemah, sehingga diperlukan model alternatif yang memadukan kembali nilai-nilai etis dan tata kelola ekonomi.¹¹

Sistensi bukti empiris dan kajian normatif menunjukkan bahwa krisis pembangunan di Indonesia bukan hanya masalah teknis distribusi pendapatan, tetapi masalah nilai dan institusi, sistem yang memberi insentif pada ekstraksi cepat dan akumulasi privat tanpa mekanisme redistribusi dan perlindungan lingkungan akan terus menyuburkan ketimpangan sosial-ekonomi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, upaya transformasi menuju pembangunan berkelanjutan harus melibatkan rekonstruksi paradigma nilai (mengembalikan dimensi etika/keadilan) sekaligus reformasi institusional untuk menahan praktik-praktik cronyism dan eksploitasi yang merusak. Kajian-kajian empiris dan teori yang dirujuk di bawah mendukung argumentasi ini dan akan menjadi dasar untuk pembahasan integratif selanjutnya pada poin-poin berikutnya¹².

2. Prinsip Ekonomi Islam sebagai Basis Etika Pembangunan Berkelanjutan

Dalam perspektif Islam, pembangunan yang berkelanjutan mesti berangkat dari prinsip-prinsip etis yang bersumber pada *maqasid al-shariah*. *Al-adl* menuntut distribusi manfaat yang adil antara naggota masyarakat, sehingga kebijakan fiskal dan mekanisme pasar harus dirancang untuk mencegah akumulasi yang eksekif pada segelintir pihak. *Istidam* (keberlanjutan) menuntut keseimbangan generasi dan pemeliharaan sumber daya

¹⁰ Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Hospes, O., Afrizal, & Pranajaya, D. (2024). *Corporate contentious politics: Palm oil companies and land conflicts in Indonesia*. Political Geography, 114: 103166.

¹¹ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. IRTI-IsDB (Occasional Paper).

¹² World Inequality Lab (Chancel, Piketty et al.) — *World Inequality Report 2022*. (Comprehensive data and analyses on global inequality).



sehingga aktivitas ekonomi tidak merusak kemampuan generasi mendatang; sementara konsep *khalifah fil-ard* (amanah pengelolaan bumi) menempatkan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap ekosistem, bukan sekadar pengejar keuntungan jangka pendek. Pemaknaan ini dirumuskan dan dikembangkan secara sistematis sebagai basis normatif yang menghubungkan tujuan syariah dengan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan¹³.

Ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif dan institusional yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme negara dengan penekanan pada etika, pembatasan spekulasi, tanggung jawab sosial, dan mekanisme redistribusi seperti zakat, wakaf, pembiayaan berbasis aset sebagai instrumen untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mengurangi ekstraksi yang merugikan lingkungan dan komunitas lokal. Dr. M. U. Chapra dan kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip ini dalam desain kebijakan publik dan instrumen keuangan seperti pembiayaan mikro berbasis syariah, zakat produktif, instrumen wakaf dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa harus meniru model sosio-ekonomi yang sekuler penuh atau yang sepenuhnya terpusat. Laporan-laporan internasional juga menyatakan bahwa ekosistem pembiayaan Islam memiliki potensi untuk menopang SDGs lewat instrumen-instrumen yang mensinergikan nilai dan tujuan pembangunan¹⁴.

Konsep value-led policy dalam kerangka *maqasid* menempatkan tujuan-tujuan syariah seperti pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta yang mana sebagai tolak ukur perumusan kebijakan ekonomi sehingga setiap kebijakan diuji tidak hanya oleh indikator ekonomi makro, tetapi juga oleh kontribusinya terhadap keadilan sosial, kesehatan lingkungan, dan martabat manusia. Pendekatan ini sejajar dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang bersifat multidimensional seperti penghapusan kemiskinan dan ketahanan pangan sehingga integrasi *maqasid* ke dalam perumusan kebijakan publik dan instrumen pembiayaan dapat memperkuat legitimasi etis serta efektivitas implementasi SDGs. Beberapa institusi internasional dan studi kontemporer merekomendasikan agar negara dan pemangku kepentingan memanfaatkan kerangka *maqasid* untuk mendesain kebijakan yang bernilai dan kontekstual terhadap realitas lokal sebagai jalan menuju harmoni antara tujuan lokal dan agenda global¹⁵.

3. Kearifan Lokal sebagai Manifestasi Nilai Ekonomi Islam dalam Konteks Nusantara

Pertama, praktik *sasi* di Maluku merupakan contoh institusi pengelolaan sumber daya berbasis komunitas yang menerapkan larangan temporal atau ruang terhadap

¹³ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank

¹⁴ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank

¹⁵ Auda, Jasser. (2010). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT / International publishers.



pemanfaatan sumber daya seperti penutupan area penangkapan ikan pada periode tertentu sehingga mencegah *over exploitation* dan menjaga kelestarian ekosistem laut.¹⁶ Studi lapang dan kajian institusional menunjukkan bahwa praktik *sasi* berfungsi sebagai mekanisme pengaturan akses (*commons governance*) yang diperkuat oleh norma sosial dan sanksi adat, sehingga menghasilkan kepatuhan kolektif dan keberlanjutan sumber daya lokal fungsi ini jelas paralel dengan konsep pengelolaan amanah yakni *khalifah* dan prinsip *istidam* dalam ekonomi Islam.¹⁷

Kedua, *Subak* yang ada di Bali sistem irigasi dan tata kelola air berbasis komunitas yang diikat dengan ritual dan struktur sosial seperti *Tri Hita Karana* menunjukkan bagaimana norma religius kultural mengorganisir produksi pertanian dan distribusi air secara adil dan kooperatif. Penelitian antropologis dan model ekologi sosial menemukan bahwa *Subak* bukan sekadar teknik irigasi tetapi sebuah institusi kolektif yang memadukan aspek spiritual, sosial, dan teknis sehingga menunjang produktivitas sekaligus konservasi lanskap. Karakter kolektif dan perhatian terhadap keseimbangan generasi pada *Subak* mengandung unsur-unsur al-*'adl* (keadilan distribusi kebutuhan air/hasil) dan *istidam* (keberlanjutan ekosistem).¹⁸

Ketiga, nilai gotong royong pada masyarakat Jawa dan Sumatera berperan sebagai modal sosial (*social capital*) yang menurunkan biaya transaksi, memperkuat jaringan solidaritas, dan menyediakan mekanisme informal untuk penanggulangan risiko ekonomi seperti modal usaha mikro, kerja bakti, atau bantuan pasca bencana.¹⁹ Studi-studi empiris menunjukkan gotong royong membantu usaha mikro kecil mengatasi keterbatasan modal dan meningkatkan *resilience* komunitas praktik yang selaras dengan instrumen redistribusi dan solidaritas dalam ekonomi Islam yakni zakat, wakaf produktif, mekanisme saling bantu. Dengan kata lain, gotong royong berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang memungkinkan penerapan kebijakan berbasis nilai di level lokal.²⁰

4. Integrasi Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal sebagai Model “Harmoni Global”

Pertama, model konseptual integrasi dirumuskan sebagai rangkaian nilai praksis sosial terhadap kebijakan publik: (a) nilai Islam (*maqasid: al- 'adl, istidam, khalifah*) menjadi prinsip normatif, (b) praksis sosial (kearifan lokal seperti *sasi, subak, gotong royong*)

¹⁶ Harkes, I., & Novaczek, I. (2002). *Presence, performance, and institutional resilience of sasi, a traditional management institution in Central Maluku, Indonesia*. *Ocean & Coastal Management*

¹⁷ Muin, A., & Rakuasa, H. (2023). *Sasi Laut as a Culture of Natural Resources Conservation to Overcome the Tragedy of the Commons in Maluku Province*. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 277–287

¹⁸ UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). *Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy*. (World Heritage Listing).

¹⁹ Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). *Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties*. (Research article, accessible via ResearchGate).

²⁰ Sumarmi (2022). *Desa Pancasila: The Implementation of Gotong Royong Values as Social Capital in Indonesia*. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 14(2):225–238.



berfungsi sebagai institusi perantara yang menerjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi aturan sosial, sanksi adat, dan mekanisme redistribusi, (c) kebijakan pembangunan mengadopsi dan menskalakan praktik-praktik ini ke dalam instrumen fiskal, pembiayaan syariah, serta regulasi lingkungan sehingga mencapai tujuan SDGs. Bukti empiris menunjukkan bahwa praktik lokal yang terorganisir efektif dalam konservasi sumber daya dan penguatan modal sosial seperti studi kasus pemberdayaan ekonomi lokal yang mengaitkan praktik adat dengan pemberdayaan ekonomi menunjukkan hasil yang positif dalam ketahanan komunitas.²¹

Kedua, implikasi kebijakan, mengoperasionalisasi model ini membutuhkan kombinasi instrumen regulasi partisipatoris yang mengakui hak adat dan mekanisme pengelolaan commons, pemanfaatan instrumen Islam seperti zakat produktif, wakaf sosial-ekonomi, pembiayaan mikro syariah sebagai sumber pembiayaan lokal untuk proyek konservasi dan usaha produktif, serta indikator kebijakan berbasis nilai yang melengkapi indikator makro (GDP) dengan ukuran keadilan distribusi, kualitas ekosistem, dan kesejahteraan sosial.²² Laporan internasional dan kajian kebijakan menyarankan bahwa ekosistem pembiayaan Islam dapat dimobilisasi untuk menunjang SDGs jika diarahkan lewat instrumen yang menekankan dampak sosial lingkungan, bukan hanya return finansial. Implementasi skema zakat wakaf yang diarahkan ke kegiatan produktif berbasis kearifan lokal dapat menurunkan kemiskinan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya.²³

Ketiga, kontribusi Indonesia pada arsitektur ekonomi global dapat diwujudkan dengan menawarkan *Local Wisdom Based Islamic Economics Framework* sebagai model yang dapat direplikasi, Indonesia menyediakan bukti empiris seperti *subak*, *sasi*, gotong royong dan praktik kelembagaan seperti lembaga zakat nasional, inisiatif wakaf produktif yang menggabungkan nilai religius dan norma adat untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan mendokumentasikan praktik-praktik ini secara sistematis, menyusun *toolkit* kebijakan (*policy toolkit*) untuk para pembuat kebijakan internasional, dan membangun pilot project finansial seperti sukuk hijau yang terikat wakaf dan zakat untuk konservasi, Indonesia bisa mendorong sinergi antara *value based governance* dan pembiayaan berkelanjutan kontribusi nyata terhadap diskursus global tentang bagaimana ekonomi berbasis nilai dapat membantu pencapaian SDGs. Laporan kolaboratif (UNDP/IRTI/GIFIIP/OECD) merekomendasikan penggabungan nilai dan instrumen keuangan untuk mempercepat pencapaian SDGs, kerangka lokal-berbasis Islam yang dikontekstualkan oleh Indonesia berpotensi menjadi salah satu model referensi dunia.²⁴

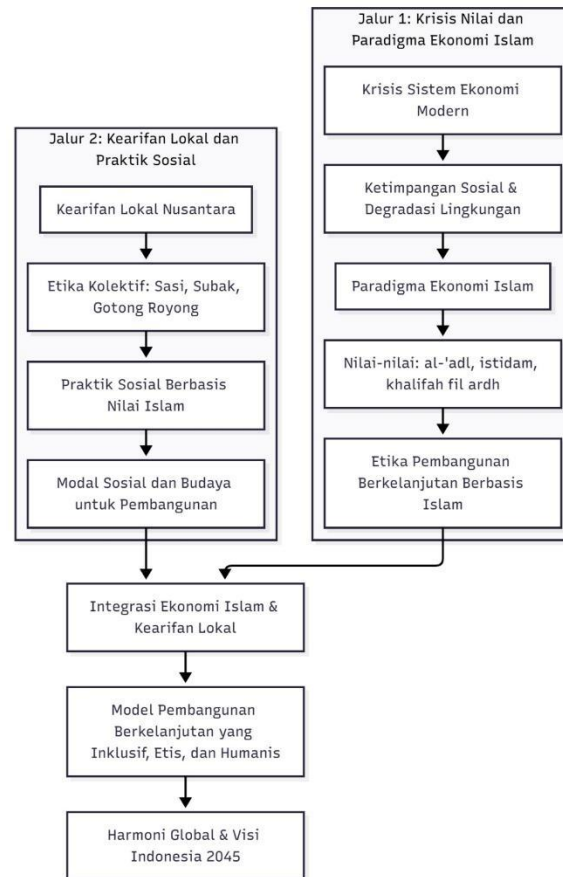
²¹ Rahman, A. R. (2023). *Local wisdom in economic practice*. Cogent Social Sciences.

²² Mukhlishin, Ramadhan, C. (2025). *Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development*

²³ OECD (2020). *How Islamic finance contributes to achieving the Sustainable Development Goals*. OECD Development Co-operation Policy Papers

²⁴ IRTI/UNDP/IFII (GIFIIP report) (2022). *Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs (GIFIIP)*.





Gambar 2. Integrasi Nilai Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis pembangunan yang dihadapi Indonesia tidak hanya bersifat struktural ekonomi, tetapi juga merupakan krisis nilai akibat dominasi paradigma kapitalistik yang menempatkan akumulasi material di atas keadilan sosial, keberlanjutan dan martabat manusia. Dalam konteks ini ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang berbasis pada *maqasid al-shariah*, dengan prinsip *al-adl, istidam*, dan *khalifah fil ard* sebagai fondasi etika pembangunan yang humanis dan berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga bersesuaian dengan nilai-nilai universal yang diakomodasi dalam agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kearifan lokal Nusantara seperti *sasi, subak*, dan *gotong royong* tidak dapat dipandang sekadar sebagai tradisi budaya, tetapi sebagai modal sosial ekonomi yang memiliki fungsi regulatif, distributif, dan ekologis yang sejalan dengan etika Islam. Praktik komunitas lokal tersebut secara empiris menghadirkan mekanisme pengelolaan sumber daya yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan,

menjadikannya sebagai praksis sosial dari nilai-nilai Islam dalam konteks lokal yang kontekstual dan mendarah daging, dengan demikian, integrasi antara nilai ekonomi Islam (normatif) dan kearifan lokal (praksis sosial) memiliki potensi besar untuk menjadi model alternatif pembangunan yang berbasis nilai, yang tidak hanya relevan dalam level kebijakan nasional, tetapi juga berpotensi menjadi kontribusi Indonesia bagi arsitektur ekonomi global. Kerangka *Local Wisdom-Based Islamic Economics Framework* yang ditawarkan penelitian ini dapat menjadi tawaran konseptual bagi tata ekonomi dunia yang lebih adil, etis, dan harmonis dari lokal menuju harmoni global.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2010). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT / International Publishers.
- Ayif Fathurrahman. (2023). The Development Studies on Islamic Economic Education Based on Local Wisdom in Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 233–251. doi:<https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.16624>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Tingkat Ketimpangan Ekonomi Turun: Rasio Gini Indonesia Jadi 0,375 per Maret 2025*. Ekonomi Bisnis.
- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Hospes, O., Afrizal, & Pranajaya, D. (2024). Corporate contentious politics: Palm oil companies and land conflicts in Indonesia. *Political Geography*, 114, 103166. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.103166>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), <https://doi.org/10.1177/1558689812437>
- Ega Rusanti, A. Syathir Sofyan, & Syarifuddin. (2022). Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal. *Journal of Islamic and Indonesian Culture*, 4(1), 45–57. doi:<https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51>
- Erwan Aristyanto & Aditya Surya Nanda. (2023). *Local Wisdom and Islamic Economics: Warung Madura MSME Success Strategy*. Prosiding ICEAT. doi:<https://doi.org/10.61132/iceat.v1i2.35>
- Harkes, I., & Novaczek, I. (2002). Presence, performance, and institutional resilience of sasi, a traditional management institution in Central Maluku, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*. [https://doi.org/10.1016/S0964-5691\(02\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0964-5691(02)00057-1)
- IRTI / UNDP / IFII (GIFIIP Report). (2022). *Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs (GIFIIP)*.
- IsDB-IRTI. (2020). *Islamic Finance and Sustainable Development Goals*. Islamic Development Bank.
- Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties. DOI:[10.1016/j.heliyon.2020.e04879](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04879)



- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muin, A., & Rakuasa, H. (2023). Sasi Laut as a Culture of Natural Resources Conservation to Overcome the Tragedy of the Commons in Maluku Province. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), DOI:[10.59653/ijmars.v1i03.139](https://doi.org/10.59653/ijmars.v1i03.139)
- Mukhlishin, Ramadhan, C. (2025). *Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development*.
- OECD. (2020). *How Islamic finance contributes to achieving the Sustainable Development Goals*. OECD Development Co-operation Policy Papers.
- Pew Research Center. (2020). *Muslim Population by Country*.
- Rahman, A. R. (2023). Local wisdom in economic practice. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2194112>
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab). (2024). *Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun*.
- Sumarmi. (2022). Desa Pancasila: The Implementation of Gotong Royong Values as Social Capital in Indonesia. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 14(2), DOI:[10.15294/komunitas.v14i2.27789](https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i2.27789)
- UNDP. (2023). *Human Development Report & SDGs Review*. United Nations Development Programme.
- UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). *Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy*.
- Yanuarti, W. A., & Rachmawati, L. (2024). *Analyzing Sustainable Development in Indonesia Based on Environmental Kuznets Curve*
- World Inequality Lab (Chancel, Piketty et al.). (2022). *World Inequality Report 2022*.

